

## **BUPATI KONAWE UTARA SULTRA RUKSAMIN PERJUANGKAN HUNIAN TETAP UNTUK WARGANYA**



Sumber gambar: *sultra.tribunnews.com*

Bupati Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ruksamin, terus menunjukkan kepeduliannya terhadap warga korban bencana banjir tahun 2019. Dalam upaya menuntaskan pembangunan hunian tetap (Huntap), Ruksamin hadir secara langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat eselon 1. Berlangsung di Ruang Rapat Lt. 12 Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Senin (17/1/2024).

Kehadiran Bupati untuk membahas perpanjangan waktu penggunaan dana hibah, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Konawe Utara. Rapat ini merupakan kelanjutan dari surat resmi Bupati Konawe Utara, nomor: 300.2/5284/ tanggal 20 Desember 2023. Rakor ini dipimpin Plt Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan penanggulangan bencana, Sorni Paska Daeli. Keberlangsungan pertemuan ini juga didukung kehadiran Deputy Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi BNPB, Dirjen Anggran Kemenkeu. Serta Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Bidang Politik, Hukum, Keamanan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Turut mendampingi Bupati Ruksamin dalam rakor ini adalah sejumlah kepala dinas dan badan terkait dari Konawe Utara. Menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi permasalahan pembangunan pasca bencana. Dalam rapat itu, Bupati Ruksamin memaparkan laporan terkait hibah rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2023 di wilayahnya. Pada tahun tersebut, Pemda Konut berhasil mendapatkan dana hibah Rp53 miliar, untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan Huntap sebanyak 628 unit senilai 31 M. Lalu rekonstruksi jalan sebesar Rp1,6 miliar, dan pembangunan 10 unit jembatan senilai Rp20,1 miliar.

Meskipun pembangunan jalan dan jembatan mencapai 100 persen realisasi, pembangunan huntap baru mencapai 58 persen dari target 628 unit. Dengan 363 unit telah berhasil dibangun dan 265 unit masih dalam proses. Namun, seperti setiap proyek besar, bupati tidak menutup-nutupi kendala yang dihadapi. Keterlambatan tender, keterbatasan akses mobilisasi bahan logistik, dan faktor cuaca menjadi hambatan utama yang membuat proses pembangunan huntap tidak rampung pada akhir tahun 2023.

Bupati Ruksamin tidak hanya berbicara tentang kendala teknis, tetapi juga menyoroti fokus Pemda Konut pada pengendalian inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem di wilayahnya pada tahun yang sama. Oleh karena itu, beliau dengan rendah hati kembali memohon perpanjangan waktu penggunaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayahnya. Dalam penutupan penyampaian, Bupati Ruksamin bahkan menjaminkan dirinya secara langsung untuk terlibat dalam proses pembangunan huntap. "Jika masih diberikan kesempatan, saya tidak butuh 12 bulan, saya hanya butuh 6 bulan. Saya akan pimpin langsung pembangunan ini," ucapnya.

Di ujung rapat Plt Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana, Sorni Paska Daeli memberikan penegasan hasil tindak lanjut perpanjangan penggunaan anggaran masih menunggu hasil koordinasi dari Kementerian dan lembaga terkait.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultrasatu.com/bupati-ruksamin-perjuangkan-huntap-untuk-warga-konawe-utara/>, Bupati Ruksamin Perjuangkan Huntap untuk Warga Konawe Utara, tanggal 17 Januari 2024
2. <https://sultra.tribunnews.com/2024/01/18/bupati-konawe-utara-sultra-ruksamin-perjuangkan-hunian-tetap-untuk-warganya?page=2>, Bupati Konawe Utara Sultra Ruksamin Perjuangkan Hunian Tetap Untuk Warganya, tanggal 18 Januari 2024

#### **Catatan Berita:**

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
  - a) Pasal 8 huruf a: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - b) Pasal 21 huruf a: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;